

DAFTAR PUSTAKA

- Adhana, H. I. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Rumah Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan. *Dharmasisya*, 1, Article, 241–263. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/34>
- Akbar, R., & Lukman, A. (2010). Manajemen Taman Milik Pemerintah Kota Bandung Berbasis Pendekatan Manajemen Aset. *Jurnal Teknik Sipil*, 17(3), 171. <https://doi.org/10.5614/jts.2010.17.3.3>
- Amir, L. (2012). *PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN RUMAH DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI*. 14, 09–18.
- Bareta, R. D., Dwiyantoro, Y., & Adhiputranto, P. (2020). Kajian Pengenaan Biaya dalam Penggunaan Barang Milik Negara. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 1(1), 95–115. <https://doi.org/10.33105/jmp.v1i1.345>
- Demetouw, M., Salle, A., & Asnawi, M. (2013). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Jayapura. *Jurnal Keuda*, 2(2), 1–15.
- Halimah, S. N. (2016). Alih Fungsi Lahan dan Transformasi Budaya Di Desa Banyuning. *Tranformasi Budaya Pesisir Desa Perancak*, 15(1), 6–10.
- Hastuti, D. (2005). *KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS ANTARA PERSEROAN TERBATAS KERETA API (PERSERO) DENGAN PENYEWA DI KOTA - SEMARANG*. Universitas Diponegoro.
- Indriani, E. A., Santoso, B., & Irawati. (2019). Penyalahgunaan Rumah Dinas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. *Notarius*, 12(2), 866–882.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29132>

Junarsin, Eddy; Susanti, M. (2018). *ANALISIS PELAKSANAAN MANAJEMEN ASET RUMAH NEGARA (STUDI PADA RUMAH NEGARA NONJABATAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR)*.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Profil KPPN Langsa. Diakses 21 Maret 2022, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/langsa/id/profil/struktur-organisasi>.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 *tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan*.

Kharisma, M. (2020). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PEMANFAATAN RUMAH NEGARA SELAIN SEBAGAI TEMPAT TINGGAL DI INDONESIA. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 7(3).

Kharisma, M., & Indri Fogar Susilowati S.H., M. H. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pemanfaatan Rumah Negara Selain Sebagai Tempat Tinggal Di Indonesia. *NOVUM : Jurnal Hukum*, 7(3), 12–26.

Kurniati, N. (2018). Pengalihan Hak Rumah Negara Kepada Pegawai Negeri Dalam Penerapan Hukum Sewa Beli. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2), 1–11. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.18>

Masfita, H. (2018). *TINDAKAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II SETELAH PEGAWAI NEGERI Pensiun*. 18(2), 16.

HETRIZA, M. (2019). PERALIHAN HAK RUMAH NEGARA GOLONGAN III MENJADI RUMAH MILIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA

PEKANBARU (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Nababan, M. I. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG MELAKUKAN PERALIHAN HAK RUMAH NEGARA GOLONGAN III (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 *tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 *tentang Rumah Negara.*

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 *tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.06/2016 *tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.*

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2018 *tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Rumah Negara.*

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 *tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*

Pratama, F. I. (2018). HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ATAS RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KAMPUS B UNIVERSITAS AIRLANGGA. In *Universitas Airlangga*. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/74144>

Saleh, D. A. (2012). TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 4 (Doctoral dissertation).

Supriyadi, S. (2017). Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 2(2), 83. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i2.13476>.

Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara.

Susanti, W. B. N. (2012). Studi Kasus Kehidupan Pengemis Di Dusun Sucen Desa Mantrianom Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).

Wicaksono, A. (2017). Penertiban Rumah Negara Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia Terkait Dengan Surat Izin Penghunian (Studi di Perumahan Negara PT. Kereta Api Indonesia Daop VI Kota Yogyakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Yaniawati, P. (2020). Penelitian Studi Kepustakaan. *Penelitian Kepustakaan (Liberary Research)*, April, 15.